

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2026**



**BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, dokumen ini cukup kritikal dan harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) didasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya telah dilakukan penyesuaian sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Penyakit (P2) Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang baik harus selaras dengan perencanaan organisasi secara menyeluruh (hingga ke unit pelaksana), terintegrasi dengan perencanaan operasional, serta sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tetap dapat direvisi apabila diperlukan, sesuai perkembangan situasi, kebijakan, maupun kebutuhan organisasi.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja. Kepada semua pihak, Bagian PA Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Penyakit (P2) maupun Tim Kerja di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Sidoarjo, 9 Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya

Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., S.H., MPH., M.Si., MAP., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Sumber Daya Manusia	5
BAB II INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN	9
Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan	10
Rincian Kegiatan	12
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)	12
B. Sumber Pendanaan	13
BAB III PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) (rencana untuk 5 Tahun) yang dibuat berdasarkan pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Penyakit (P2)/eselon I dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk satuan kerja di tingkat eselon II, dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam memperoleh capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada RKT yang sistematis maka pelaksanaan RAK dapat dilakukan monitoring tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta berpeluang menemukan langkah alternatif dalam meningkatkan capaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih tepat. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka BBKK Surabaya perlu menyusun RKT Tahun 2026 yang mengacu pada RAK Tahun 2025-2029.

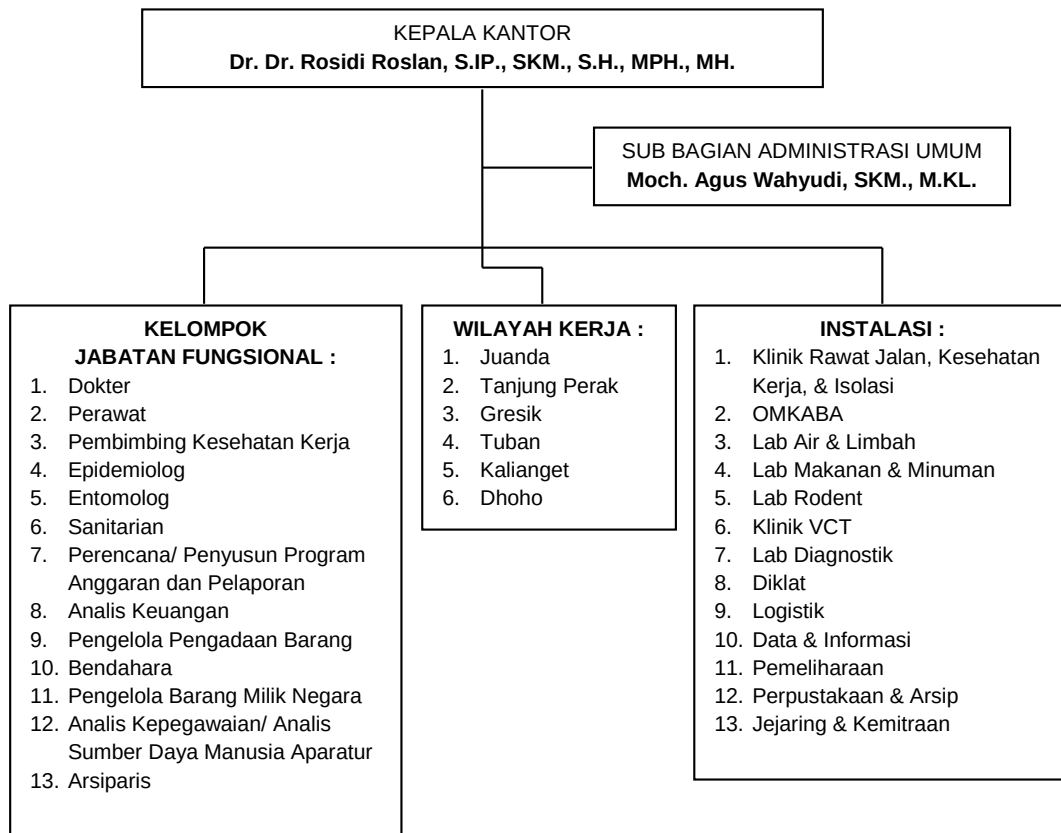
Tujuan penyusunan RKT Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja BBKK Surabaya;
- b. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan BBKK Surabaya;
- c. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya RKT sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BBKK Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam permenkes 356/2008 Jo 2348/2011.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBKK Surabaya dapat di lihat pada gambar berikut :

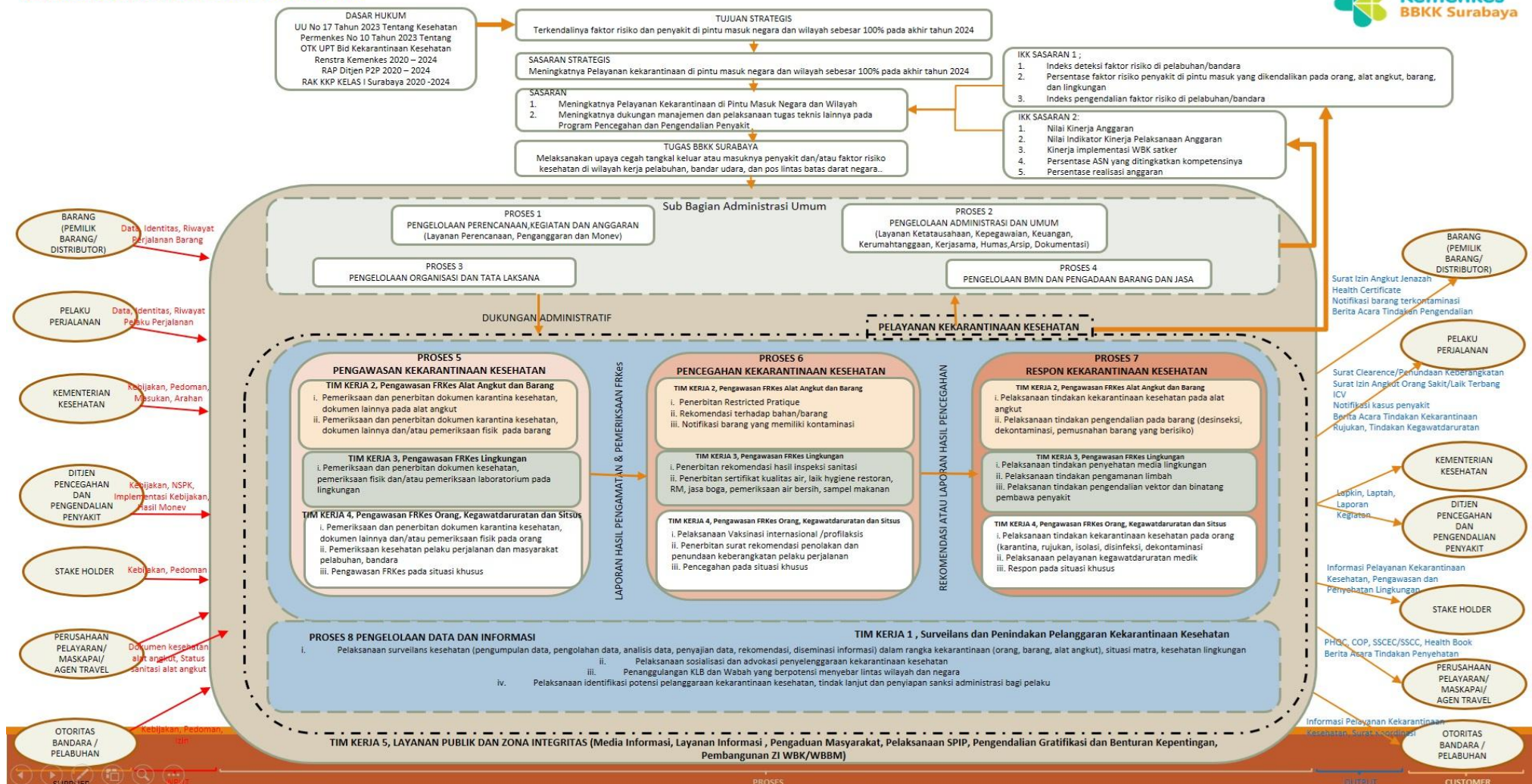


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Bab IV Pasal 7, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Kepala, dengan susunan organisasi BBKK Surabaya terdiri atas:

- Sub bagian Administrasi Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Tim Kerja

Dalam waktu menunggu Keputusan Menteri Kesehatan terbaru tentang proses bisnis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan serta untuk menyesuaikan struktur organisasi yang baru, maka BBKK Surabaya menyusun proses bisnis sebagaimana tersaji pada gambar. Proses bisnis disusun dengan mengadaptasi dari proses bisnis yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024.

PROSES BISNIS BBKK SURABAYA



a. Sub bagian Administrasi Umum

Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKK Surabaya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
4. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
5. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
6. Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Kerja

Dalam rangka menindaklanjuti Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja. Maka dari itu dibentuklah Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Nomor HK.02.03/C.IX.7.1/3641/2024 tentang Tim Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Surabaya, maka dibentuk :

▪ **Instalasi**

- 1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- 2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- 3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
- 4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- 5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

▪ **Wilayah Kerja**

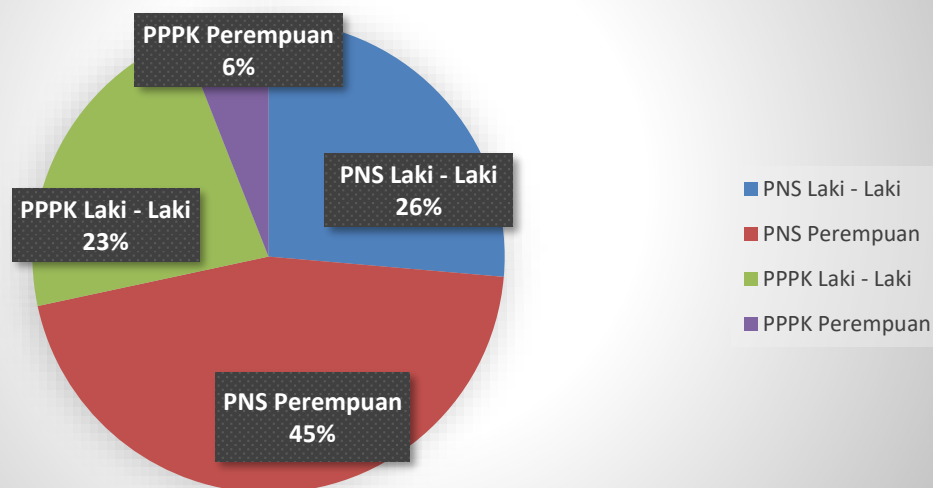
- 1) Wilker merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- 2) Wilker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
- 3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- 4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset BBKK Surabaya dalam mencapai visi dan misinya. Pada Tahun 2026, BBKK Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 201 ASN. Adapun rincian sumber daya manusia yang terdiri dari 144 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 57 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang tersebar di kantor induk (Juanda) dan 5 wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tuban, Pelabuhan Kalianget dan Bandara Dhoho Kediri).

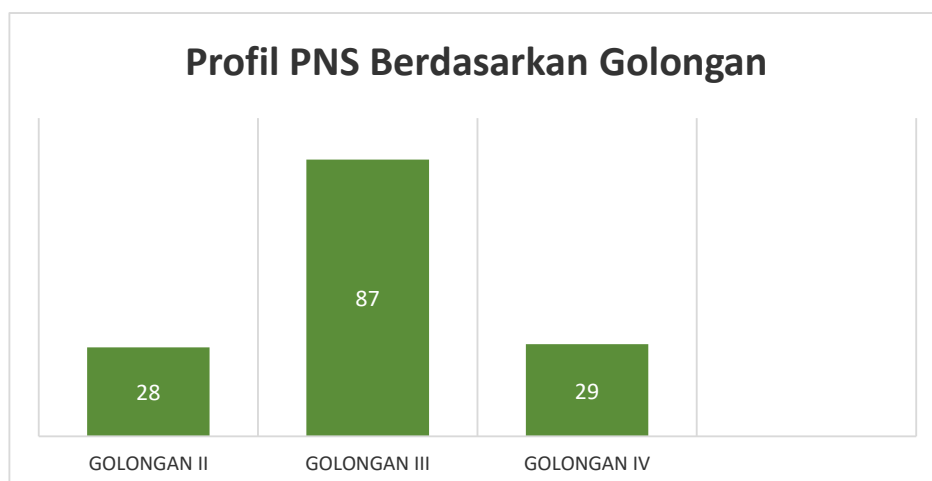
Persentase sumber daya manusia (SDM) BBKK Surabaya pada Tahun 2026 dapat disajikan pada diagram berikut :

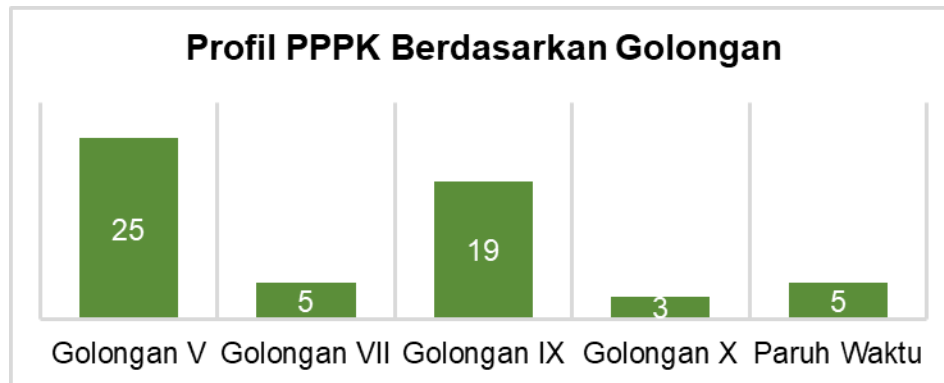
Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram tersebut, terlihat dari dua jenis SDM yang dimiliki BBKK Surabaya yang terdiri dari PNS dan PPPK maka dapat dilihat bahwa tenaga PNS lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 45% dibandingkan dengan PNS yang berjenis kelamin laki-laki hanya sebesar 26%, untuk tenaga PPPK yaitu sebanyak 23% untuk tenaga PPPK laki-laki dan 6% untuk tenaga PPPK perempuan.

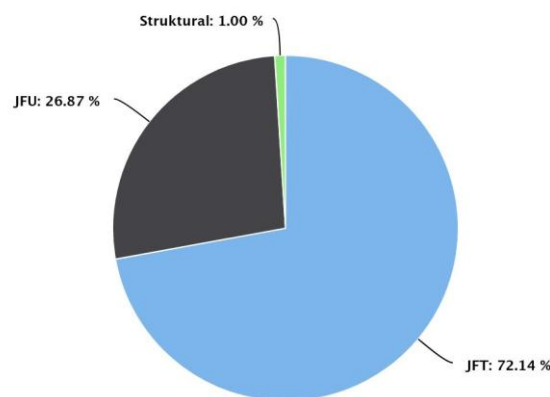
Profil PNS Berdasarkan Golongan





Sebagian besar ASN yang berstatus sebagai PNS di BBKK Surabaya pada Tahun 2026 berada pada golongan III yaitu sebanyak 87 orang yang dimiliki setiap pegawai yaitu minimal berijazah strata 1 dan juga karena pengembangan karir dari setiap ASN. Sedangkan untuk PPPK terdapat golongan V, VII, IX, X dan Paruh Waktu dengan rincian golongan V sebanyak 25 orang, golongan VII sebanyak 5 orang, golongan IX sebanyak 19 orang dan golongan X sebanyak 3 orang serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 orang.

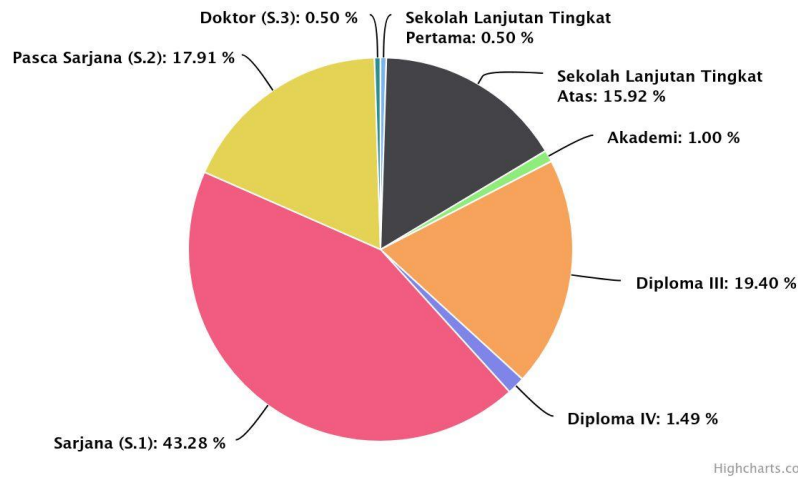
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Highcharts.com

Berdasarkan profil ASN tersebut terdapat sebanyak 145 orang atau sekitar 72,14% ASN dengan status PNS dan PPPK telah memiliki jabatan fungsional sedangkan sebanyak 58 orang atau sekitar 26,87% terlihat masih terdapat yang memiliki jabatan fungsional umum. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) terus mendorong ASN untuk mengembangkan karir dalam jabatan fungsional tertentu melalui proses inpassing. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya terus mendorong setiap ASN yang agar dapat mengikuti pelatihan/diklat fungsional yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Dari data yang disajikan, dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebagian besar telah dimiliki SDM di BBKK Surabaya pada tenaga ASN, sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma tidak sebanyak Sarjana (S1) sebanyak 19.40%. Selain jenjang Sarjana dan Diploma dapat di lihat bahwa masih terdapat SDM yang masih memiliki tingkat pendidikan SMA dan SMP dengan tingkat persentase pendidikan dari tenaga ASN di jenjang pendidikan SMP sebanyak 0,50% dan SMA sebanyak 15,92%. Pada ASN kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.

BAB II
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Unit Organisasi/Satker	:	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit/ Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
Program	:	1. Program Sistem Ketahanan Kesehatan; 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Program Sistem Ketahanan Kesehatan 1. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara Program Dukungan Manajemen 1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah; 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	Pagu Anggaran 2026
1	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Koordinasi pelayanan kekarantinaan pelabuhan/bandara/PLBD	103.968.000
		Koordinasi pelayanan kekarantinaan wilayah kerja	45.264.000
		Sosialisasi regulasi kekarantinaan dan diseminasi informasi pelaksanaan kekarantinaan	33.522.000
		Penyuluhan penjamah makanan pra operasional Matra Haji	15.580.000
		Penyuluhan penjamah makanan di pelabuhan dan bandara	33.600.000
		Pemeriksaan penjamah makanan di pelabuhan dan bandara	25.440.000
		Monitoring/Evaluasi ke klinik/RS dalam rangka penerbitan ICV	244.176.000
		Verifikasi ke klinik/RS dalam rangka penerbitan ICV	133.540.000
		Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus Bencana/KLB	166.564.000
		Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus Event Nasional	44.970.000
		Pengiriman Sample Surveilans	5.880.000
		Pembinaan Kesehatan Jamaah Umrah dan Vaksinasi	328.872.000
		Pengawasan/Pemeriksaan Minuman Makanan Usap Alat Kegiatan Matra	139.666.000
		Pengawasan/Pemeriksaan Bakteri Leptospira	45.936.000
		Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I Sanitasi Asrama dan Jasaboga Pesawat Haji	6.244.000
		Pengambilan Sampel Air Bersih Pemeriksaan Tahap I Asrama Haji dan Jasaboga Pesawat Haji Pemeriksaan Pertama	2.612.000
		Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II Sanitasi Asrama dan Jasaboga Pesawat Haji	6.244.000
		Pengambilan Sampel Air Bersih Pemeriksaan Tahap II Asrama Haji dan Jasaboga Pesawat Haji Pemeriksaan Pertama	2.612.000
		Pengawasan Pestisida	5.780.000
		Uji Resistensi	22.260.000
		Uji Petik Pemeriksaan Makanan Secara Mikrobiologi	7.248.000
		Pengawasan/Pemeriksaan Bakteri Legionella	7.000.000
		Pemeriksaan penjamah makanan di pelabuhan dan bandara	153.924.000
		Pengelolaan Limbah Medis	82.960.000
		Penyelidikan epidemiologi dan Koordinasi dengan Lintas sektor	92.032.000
		Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Kalianget	58.715.000
		Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Gresik	39.533.000
		Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Brondong Tuban	64.005.000
		Pengawasan Health Certificate OMKABA	127.296.000
		Koordinasi Health Certificate OMKABA dengan Lintas Sektor	124.038.000
		Operasional Pelayanan Kesehatan Deteksi Dini HIV	24.032.000
		Operasional Pelayanan Kesehatan Deteksi Dini Terduga TB	24.372.000
		Pengendalian vektor DBD	90.724.000

		Pemetaan	3.658.000
		Persiapan Bahan dan Alat	45.253.000
		Pemasangan Perangkat	122.838.000
		Identifikasi Tikus dan Pinjal	1.180.000
		Pengendalian Vektor Diare	22.172.000
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	64.800.000
		Survei Vektor Malaria	41.280.000
		Survei Vektor Diare	38.160.000
		Deteksi Dini Terduga HIV AIDS	18.396.000
		Deteksi Dini Terduga TB	81.825.000
		Survei Faktor Risiko Penyakit DBD Kategori II	2.880.000
		Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala besar	1.056.240.000
		Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala besar	978.570.000
		Layanan Kesehatan pada situasi khusus Pelabuhan	744.120.000
		Peralatan Penunjang Ambulance Klinik	99.430.000
		Sarana Pelayanan Kesehatan Terbatas Masyarakat Pelabuhan dan Bandara	120.797.000
		Sarana Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus	42.449.000
		Sarana Pengawasan Vektor dan Sanitasi	90.820.000
		APD Pemeriksaan Pelabuhan dan Bandara	961.660.000
		Pemeliharaan Alat Kesehatan	446.944.000
		Bahan Pendukung Dokumen Kekarantinaan Kesehatan	74.600.000
		Total indikator 1	7.366.681.000
2	Nilai SAKIP	Penyusunan Laporan Tahunan	4.590.000
		Penyusunan Laporan Kinerja	4.590.000
		Desk Penyusunan Laporan Kinerja	42.348.000
		Desk SAKIP	77.976.000
		Total indikator 2	129.504.000
3	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Penyusunan ABK Kepegawaian	25.424.000
		Pengelolaan Arsip Inaktif di Record Centre Tanjung Perak dan pendukung perlengkapan kearsipan	15.904.000
		Gaji dan Tunjangan PNS	23.829.434.000
		Gaji dan Tunjangan PPPK	5.754.867.000
		Honor yang terkait dengan Operasional Kerja	135.720.000
		Jasa Pos/Giro/Sertifikat	9.500.000
		Penggandaan, Penjilidan, dan Laminasi	5.400.000
		Pembuatan ID Card dan Pengurusan Pas Bandara Personil/Mobil	130.826.000
		Bahan Operasional Perkantoran	360.902.000
		Medical Check Up dan Tes Narkoba Pegawai	674.857.000
		Langganan Aplikasi	21.249.000
		Rapat Koordinasi dengan LS/LP	181.440.000
		Peningkatan Kapasitas Administrasi dan Manajemen dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan publik	17.360.000
		Peningkatan Kapasitas Surveilans Penyakit Potensial Wabah	58.820.000
		Peningkatan Tata Laksana Penanganan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	23.712.000
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Epidemiolog	71.136.000
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Fumigasi	56.900.000
		Peningkatan Kapasitas Basic Sea Survival	113.800.000
		Peningkatan Kapasitas Pengendalian Vektor Hama, Alat Angkut, dan Lingkungan	56.900.000
		Peningkatan Kapasitas Penyusunan Baseline Data Pengawasan Alat Angkut dan Barang	56.900.000

		Peningkatan Kapasitas Tenaga Entomolog Kesehatan	34.970.000
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Sanitarian	50.216.000
		Peningkatan Kapasitas ACLS	26.936.000
		Peningkatan Kapasitas BTCLS	26.936.000
		Peningkatan Kapasitas kompetensi dokter	153.600.000
		Peningkatan Kapasitas kompetensi perawat	153.600.000
		Peningkatan Kapasitas kompetensi pembimbing kesehatan kerja	15.022.000
		Total indikator 3	32.062.331.000
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	732.809.000
		Perawatan Gedung Kantor	1.256.294.000
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	196.000.000
		Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	511.218.000
		Perawatan Kendaraan Roda 2/4	853.195.000
		Perawatan Sarana Gedung	108.645.000
		Langganan Daya dan Jasa	1.259.340.000
		Sewa kendaraan operasional	239.020.000
		Total indikator 4	5.156.521.000
5	Persentase Realisasi Anggaran	Penyusunan RKBMN	14.116.000
		Penyusunan perencanaan PNPB	34.656.000
		Verifikasi perencanaan PNPB	34.656.000
		Total indikator 5	83.428.000
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	Pelaksanaan Kekarantinaan di Pelabuhan Penyeberangan	184.800.000
		Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara	654.720.000
		Total indikator 6	839.520.000
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	Sarana Promosi Kesehatan	78.275.000
		Total indikator 7	78.275.000
		Jumlah	45.716.260.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Tahun Berjalan 2026			Prakiraan Maju					
		Volume	Pagu Satuan Biaya	Realisasi	2027	2028	2029	2027	Alokasi 2028	2029
DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan									
DZ.7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	6.521	8.284.476.000	2.708.902.582	6.521	6.521	6.521	8.284.476.000	8.284.476.000	8.284.476.000
PEA	Koordinasi	60	149.232.000	7.160.000	60	60	60	149.232.000	149.232.000	149.232.000
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	60 kegiatan	149.232.000	7.160.000	60	60	60	149.232.000	149.232.000	149.232.000
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	505	82.702.000	15.406.942	505	505	505	82.702.000	82.702.000	82.702.000
PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	505 orang	82.702.000	15.406.942	505	505	505	82.702.000	82.702.000	82.702.000
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.316	949.442.000	-	2.316	2.316	2.316	949.442.000	949.442.000	949.442.000
QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	2.316 orang	949.442.000	-	2.316	2.316	2.316	949.442.000	949.442.000	949.442.000
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.459	5.188.125.000	2.255.054.330	3.459	3.459	3.459	5.188.125.000	5.188.125.000	5.188.125.000
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1.235 layanan	482.486.000	131.373.536	1.235	1.235	1.235	482.486.000	482.486.000	482.486.000
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	150 layanan	554.023.000	62.633.100	150	150	150	554.023.000	554.023.000	554.023.000
QAH.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	280 layanan	184.800.000	36.059.800	280	280	280	184.800.000	184.800.000	184.800.000
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	744 layanan	654.720.000	145.400.000	744	744	744	654.720.000	654.720.000	654.720.000
QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	74 layanan	90.724.000	12.446.950	74	74	74	90.724.000	90.724.000	90.724.000
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	59 layanan	172.929.000	49.876.650	59	59	59	172.929.000	172.929.000	172.929.000
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	46 layanan	22.172.000	4.519.200	46	46	46	22.172.000	22.172.000	22.172.000
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	180 layanan	64.800.000	11.220.000	180	180	180	64.800.000	64.800.000	64.800.000
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	24 layanan	41.280.000	7.650.000	24	24	24	41.280.000	41.280.000	41.280.000
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	72 layanan	38.160.000	5.355.000	72	72	72	38.160.000	38.160.000	38.160.000
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	14 layanan	18.396.000	12.146.400	14	14	14	18.396.000	18.396.000	18.396.000
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	15 layanan	81.825.000	23.422.000	15	15	15	81.825.000	81.825.000	81.825.000
QAH.U22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota	8 layanan	2.880.000	990.694	8	8	8	2.880.000	2.880.000	2.880.000
QAH.U27	Layanan Kesehatan Haji pada masa Embarkasi skala besar	9 layanan	1.056.240.000	944.045.000	9	9	9	1.056.240.000	1.056.240.000	1.056.240.000
QAH.U30	Layanan Kesehatan Haji pada masa Debarkasi skala besar	9 layanan	978.570.000	667.360.000	9	9	9	978.570.000	978.570.000	978.570.000
QAH.U31	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	540 layanan	744.120.000	140.556.000	540	540	540	744.120.000	744.120.000	744.120.000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	181	1.914.975.000	431.281.310	181	181	181	1.914.975.000	1.914.975.000	1.914.975.000
RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	181 paket	1.914.975.000	431.281.310	181	181	181	1.914.975.000	1.914.975.000	1.914.975.000
WA	Program Dukungan Manajemen									
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	115	37.431.784.000	16.058.810.232	115	115	115	11.596.748.000	11.596.748.000	11.596.748.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43	36.445.664.000	16.057.296.232	43	43	43	10.610.628.000	10.610.628.000	10.610.628.000
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13 layanan	184.948.000	11.628.800	13	13	13	184.948.000	184.948.000	184.948.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	30 layanan	36.260.716.000	16.045.667.432	30	30	30	10.425.680.000	10.425.680.000	10.425.680.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	70	916.808.000	1.514.000	70	70	70	916.808.000	916.808.000	916.808.000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	916.808.000	1.514.000	70	70	70	916.808.000	916.808.000	916.808.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	69.312.000	-	2	2	2	69.312.000	69.312.000	69.312.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 dokumen	69.312.000	-	2	2	2	69.312.000	69.312.000	69.312.000
	Total	6.636	45.716.260.000	18.767.712.814	6.636	6.636	6.636	19.881.224.000	19.881.224.000	19.881.224.000

B. Sumber Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Alokasi per Sumber Pendanaan TA 2026			Lokasi
		RM	PNBP	Efektif	
DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan				
DZ.7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	-	8.284.476.000	8.284.476.000	
PEA	Koordinasi	-	149.232.000	149.232.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	-	149.232.000		
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	82.702.000	82.702.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	-	82.702.000		
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	-	949.442.000	949.442.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	-	949.442.000		
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	5.188.125.000	5.188.125.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	-	482.486.000		
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	-	554.023.000		
QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	-	184.800.000		
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	-	654.720.000		
QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	-	90.724.000		
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	-	172.929.000		
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	-	22.172.000		
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	-	64.800.000		
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	-	41.280.000		
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	-	38.160.000		
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	-	18.396.000		
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	-	81.825.000		
QAH.U22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota	-	2.880.000		
QAH.U27	Layanan Kesehatan Haji pada masa Embarkasi skala besar	-	1.056.240.000		
QAH.U30	Layanan Kesehatan Haji pada masa Debarkasi skala besar	-	978.570.000		
QAH.U31	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	-	744.120.000		
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	1.914.975.000	1.914.975.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	-	1.914.975.000		
WA	Program Dukungan Manajemen				
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	36.260.716.000	1.171.068.000	37.431.784.000	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	36.260.716.000	184.948.000	36.445.664.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	-	184.948.000		
EBA.994	Layanan Perkantoran	36.260.716.000	-		
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	916.808.000	916.808.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	916.808.000		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	69.312.000	69.312.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	69.312.000		
Total		36.260.716.000	9.455.544.000	45.716.260.000	

BAB III

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBKK Surabaya supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan dokumen RKT untuk jangka waktu satu tahun yang disusun secara sistematis dan RAK untuk jangka waktu lima tahun, yang merupakan turunan dari RAP Ditjen P2 dan Renstra Kemenkes. RKT BBKK Surabaya Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada Tahun 2026. Dokumen RKT menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama Tahun 2026, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan dokumen RKT yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.